

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga rekreasi merupakan kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu luang dan dilakukan secara sukarela. Kegiatan olahraga rekreasi dilakukan sebagai proses dari pemulihan kesehatan dan kebugaran yang berguna untuk menghilangkan kepenatan dari rutinitas sehari-hari. Di masa modern ini masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya olahraga rekreasi sebagai sarana untuk melepaskan kepenatan. Bentuk kegiatan olahraga rekreasi bermacam-macam, mulai dari yang sederhana seperti jalan sore, *jogging*, bersepeda hingga yang membutuhkan tempat atau suasana baru seperti *hiking*, *tracking* dan berkemah. Hal tersebut memacu berkembangnya sektor pariwisata sebagai wadah pendukung masyarakat dalam menyalurkan olahraga rekreasi.

Menggeliatnya masyarakat yang melakukan kegiatan olahraga rekreasi mendukung berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia. Berkembangnya sektor pariwisata cukup memiliki peran penting dalam hal pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar daerah yang memiliki potensi wisata atau pun budaya yang dapat dikembangkan dalam hal sektor pariwisata. Hal tersebut dapat terjadi karena setiap kegiatan pada sektor pariwisata yang terjadi di suatu daerah akan menggerakkan sektor-sektor lainnya seperti, industri kerajinan, industri pakaian, sektor kuliner, sektor jasa, sektor pertanian, sektor kuliner dan lainnya. Dapat dikatakan terciptanya sektor pariwisata yang ideal akan memajukan berbagai sektor yang ada di suatu daerah apabila dikelola dengan baik.

Terciptanya sektor pariwisata yang ideal tidak terlepas dari peran tiga pilar utama yaitu, pemerintah, swasta dan masyarakat. Ketiga pilar tersebut haruslah bekerja sama dengan baik dalam perannya masing-masing. Pemerintah memiliki peran sebagai institusi yang memiliki wilayah administrasi mulai dari pusat hingga daerah dan sebagai pemegang peraturan. Pihak swasta yaitu pemegang modal, pengusaha atau pun pihak luar yang terlibat dalam kegiatan yang memajukan sektor pariwisata. Terakhir yaitu masyarakat yang merupakan pemilik dari lokasi dan sumber daya yang dijadikan sebagai objek wisata. Masyarakat dalam hal ini merupakan masyarakat umum sekitar tempat wisata, tokoh adat serta lembaga swadaya masyarakat.

Keterlibatan masyarakat di sektor pariwisata tidak hanya pemanfaatan dari hasil kegiatan tersebut tetapi masyarakat terlibat dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan dalam hal pengembangan pariwisata di daerah tersebut sehingga setiap keputusan yang diambil selalu memperhatikan kondisi alam dan sosial-budaya sekitar.

Pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai pengelola dan menekankan pada nilai-nilai lingkungan, masyarakat lokal dan nilai sosial-budaya daerah tersebut sehingga akan tercipta situasi yang saling menguntungkan antara wisatawan dan masyarakat lokal, seperti wisatawan mendapatkan kenyamanan saat berwisata dan memberikan kesejahteraan terhadap penduduk daerah wisata. Salah satu cara pengelolaan pariwisata yang tepat dalam hal memperhatikan dan memajukan kesejahteraan masyarakat sekitar yaitu dengan *Community Based Tourism (CBT)* atau Pariwisata Berbasis Masyarakat.

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat merupakan pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata serta menjadi pihak yang mendapatkan keuntungan paling banyak untuk mensejahterakan masyarakat serta lingkungan sekitar tempat wisata. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan

lingkungan sekitar destinasi wisata. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki kebermanfaatan lain. Sektor pariwisata juga berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat dalam hal ekonomi, sarana dan prasarana, kesehatan dan pastinya kesejahteraan masyarakat.

Kasepuhan karang yang terletak di Desa Jagaraksa, Kecamatan Muncung, Lebak Banten adalah kelompok masyarakat yang berdaulat atas hutan adat mereka yang sempat menjadi sengketa selama 15 tahun dengan pemerintah karena wilayah hutan adat mereka termasuk dalam wilayah perluasan area konservasi di bawah pengelolaan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak (BTNGHS) pada tahun 2003. Sengketa tersebut menyebabkan sulitnya masyarakat menggarap hutan adat secara turun menurun karena peraturan yang melarang dan membatasi penggarapan lahan oleh pemerintah. Pada tahun 2018 kemarin akhirnya sengketa tersebut berakhir dengan keluarnya *SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016* tentang “*Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang Seluas 462 Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncung Kabupaten Lebak Banten*” Masyarakat Kasepuhan Karang sekarang bebas menggarap hutan adat mereka.

Pengelolaan hutan adat yang sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat Kasepuhan Karang, hal tersebut memberikan keleluasaan kepada masyarakat Kasepuhan Karang untuk mengelola dan mengembangkan tanah adat nya sendiri yang seluas 462 hektar dengan peraturan dan ketentuan adat secara turun temurun. Kebebasan dalam mengelola hutan adat dimanfaatkan oleh masyarakat Kasepuhan Karang untuk memaksimalkan sektor pertanian dan peternakan.

Kebebasan dalam mengelola hutan adat memberikan kesempatan kepada kelompok pemuda adat untuk mengembangkan pariwisata. Pengembangan pariwisata menjadi suatu hal yang menarik selain pengelolaan secara langsung oleh pemuda adat Kasepuhan Karang dalam pengembangannya yang terfokus kepada pariwisata yang tidak mengesampingkan kearifan lokal sebagai jati diri Kasepuhan Karang

dengan memaksimalkan keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Dalam hal pengembangan pariwisata Kasepuhan Karang memiliki potensi wisata yang berada di wilayah hutan adat yaitu, Pesona Meranti yang merupakan area perkemahan atau *Camping Ground* dan curug Karimuay yang dapat ditempuh dengan trekking selama 1-2 jam dari area perkemahan Pesona Meranti.

Pada perjalanannya pengelolaan *Camping Ground* Pesona Meranti dan curug Karimuay yang dikelola sejak tahun 2017 oleh masyarakat Kasepuhan Karang. Pengelolaan yang baru berjalan kurang lebih tiga tahun oleh masyarakat yang dapat dikatakan menggunakan prinsip pariwisata berbasis masyarakat dan dalam kegiatan pariwisata tersebut apakah memberikan dampak kepada masyarakat sekitar.

Peneliti ingin mengetahui pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Karang apakah sesuai dengan prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh peran masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Perbedaan *camping ground* Pesona Meranti dan curug Karimuay dengan destinasi wisata lainnya adalah letak geografisnya berada di wilayah hutan adat Kasepuhan Karang yang secara tidak langsung bersinggungan dengan adat istiadat dan kebudayaan dalam kegiatannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang membahas tentang pariwisata berbasis masyarakat seperti penelitian yang dilakukan oleh (Munawaroh, 2017), (Sugi Rahayu, Si, Utami, Nur, & Fitriana, 2015) dan (Rusyidi & Fedryansah, 2018) yang membahas tentang pengembangan pariwisata menggunakan konsep pariwisata berbasis masyarakat pada daerah yang notabene merupakan kota atau kabupaten, serta penelitian (M. Hasanah, 2017) yang meneliti tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di objek wisata Rammang-Rammang. Keterbaruan dari penelitian kali ini adalah dilakukan di Kasepuhan Karang yang merupakan salah satu hutan adat yang dialih fungsikan untuk dikelola oleh masyarakat adat yang salah satunya dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata yang

pengelolaannya menggunakan penerapan pariwisata berbasis masyarakat semenjak tahun 2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti tuliskan bahwa penerapan pariwisata berbasis masyarakat merupakan suatu cara untuk melibatkan masyarakat sekitar destinasi wisata agar lebih terlibat dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan kebermanfaatannya secara langsung. Peneliti juga mengidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penerapan, peran serta dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kasepuhan Karang dari kegiatan pariwisata di Pesona Maranti dan Curug Karimuay.

C. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah hanya pada penerapan pariwisata berbasis masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan Karang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah peneliti jabarkan maka didapatkan rumusan masalah seperti berikut: Bagaimana penerapan pariwisata berbasis masyarakat di Kasepuhan Karang?

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan yang berhubungan dengan pengelolaan kepariwisataan.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Masyarakat Kasepuhan Karang

Meningkatkan kesadaran serta pengetahuan masyarakat akan pentingnya pengelolaan pariwisata yang melibatkan peran serta

masyarakat sehingga masyarakat dapat mendapatkan kebermanfaatan dari kegiatan pariwisata secara penuh

b. Bagi Pemuda Adat Kasepuhan Karang

Meningkatkan pengetahuan akan pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat sehingga kebermanfaatan yang didapatkan oleh masyarakat lebih maksimal.

c. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan terhadap pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat yang ideal.

